

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Syukur. (2007). *Budaya birokrasi di Indonesia*. PT Pustaka.
- Dwiyanto, A. (2002). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. PSKK-UGM.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Endang, S. (2010). *Memahami prinsip penyelenggara administrasi Pendidikan*. Erlangga.
- Firdausijah, R. T., Alaslan, A., Mustanir, A., Abdurohim, A., Sunariyanto, S., Fauzan, R., & Amane, A. P. O. (2023). *Manajemen sektor publik*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Flippo, E. B. (1999). *Manajemen tenaga kerja*. Sinar Baru.
- Hanggraeni, D. (2012). *Manajemen sumber daya manusia*. Lembaga Penerbit FE UI.
- Hasibuan, M. S. P. (2020). *Manajemen sumber daya manusia* (Edisi Revisi). PT Bumi Skrip.
- Henry, N. (1988). *Public administration and public affairs*. Englewood Cliffs: Prentice Hall Inc.
- Wursanto, I. G. (1989). *Manajemen kepegawaian*. Penerbit Kanisius.
- Indriana, F. (2019). *Sistem pemerintahan desa kecamatan*. Loka Aksara.
- Jones, B. (2017). *The good of culture organization in company*. Addison-Wesley Publishing Company.
- Kast, F. E., & Rosenzweig, J. E. (1990). *Organisasi dan manajemen*. Bumi Aksara.
- Keban, Y. T. (2008). *Enam dimensi strategis administrasi publik (Konsep, teori dan isu)*. Gava Media.
- Kadarisman, M. (2012). *Manajemen pengembangan sumber daya manusia*. Raja Grafindo Persada.
- Manullang, M. (2012). *Dasar-dasar manajemen bagi pimpinan perusahaan*. Gajah Mada Press.
- Makara Merah. (2022). *Budaya birokrasi yang lamban, tidak efisien, dan korup* (Edisi Kedua). Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://law.ui.ac.id/wp-content/uploads/2022/09/Percikan-Makara-Merah-ebook.pdf>

- Marini, F. (2000). *Public administration. In J. M. Shafritz (Ed.), Defining public administration: Selections from the international policy and administration* Westview Press.
- Thoha, M. (2005). *Perilaku organisasi: Konsep dasar dan aplikasinya*. PT Raja Grafindo Persada.
- Thoha, M. (1993). *Kepemimpinan dalam manajemen: Suatu pendekatan perilaku*. Raja Grafindo Pustaka.
- Nahrudin, Z. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola SDM pemerintahan*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nitisemito. (2019). *Manajemen sumber daya manusia* (Edisi Ketiga). Ghalia Indonesia.
- Pasolong, H. (2010). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.
- Pasolong, H. (2007). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.
- Ramlan, S. (2011). *Memahami ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Samsudin, S. (2013). *Manajemen sumber daya manusia*. Pustaka Setia.
- Saebani, B. A., & Afifuddin. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. CV Pustaka Setia.
- Said, M. (2007). *Birokrasi di negara birokratis: Makna, masalah dan dekonstruksi birokrasi Indonesia*. UMM Press.
- Satoto, S. (2004). *Pengaturan eksistensi dan fungsi Badan Kepegawaian Negara*. HK Offset.
- Siagian, S. P. (2013). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Script.
- Simamora, B. (2005). *Analisis multivariat pemasaran*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siswanto. (2011). *Pengantar manajemen*. PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukarna. (2011). *Dasar-dasar manajemen*. CV Mandar Maju.
- Tozi, J. A., Rizzo, J. R., & Carroll, S. J. (2004). *Organisasi: Perilaku, struktur, proses* (Edisi kelima, Jilid 1, Cetakan ke-8). Penerbit Erlangga.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembinaan Aparatur Sipil Negara. (2017). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 151.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. (2018). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021. (2020). Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020. (2019). Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022. (2021). Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen. (2022). Kabupaten Bireuen.

Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. (2019). Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Keputusan Bupati Bireuen Nomor 339 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen. (2023). Kabupaten Bireuen.

Jurnal

- Akhsrullah. (2014). *Intervensi pejabat politik dalam mutasi pejabat struktural di sekretariat daerah Kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Ananda, G., Syaiful, & Tamrin. (2024). Kepentingan dalam mutasi aparatur sipil negara di Kabupaten Bungo pada tahun 2021. *Jurnal Politik Indonesia*, 10(2), 134–143.
- Anggraeni, I., & Risnawati, W. (2024). Pengaruh perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap realisasi penggunaan anggaran pada Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Jawa Barat. *AKURAT | Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 15(03), 29–43.
- Apriadi, R. Z. (2016). Proses pelaksanaan mutasi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. *Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1–21.
- Artisa. (2023). Kepemimpinan camat perempuan: Studi kasus Nurul Hidyati. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–58.
- Asrul, M., Burhanuddin, B., & Abdi, A. (2020). Pelaksanaan mutasi pejabat struktural di pemerintah daerah Kabupaten Takalar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 265–278.
- Baihaqi, I. (2019). *Implementasi Pasal 224 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait syarat camat* (Studi di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur) [Disertasi, Universitas Brawijaya].
- Bakti, D. W. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai: Pola mutasi, penghargaan dan lingkungan kerja (Literature review manajemen sumber daya manusia). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 2(1), 41–50.
- Bataha, K. (2013). Dampak kebijakan mutasi jabatan struktural dalam pelayanan publik (Suatu studi di Kabupaten Kepulauan Sangihe). *Acta Diurna Komunikasi*, 2(4).
- Darmawati, Irmawati, & Yuliana. (2024). Analisis pelaksanaan mutasi jabatan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (BKPSDMA) Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 15(2), 169–177.
- Daulay, M. (2018). *Efektivitas pelaksanaan mutasi pegawai dalam rangka pengembangan karir pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Kepegawaian*

Daerah (BKD) Kabupaten Mandailing Natal. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sumatera Utara.

- Davis, R., & Thompson, J. (2021). Age and motivation in the workplace: A study of seniority systems. *Journal of Organizational Psychology*, 21(3), 45–58.
- Dirja, I. K., & Razak, I. (2020). Pengaruh mutasi, promosi jabatan dan kepuasan kerja terhadap prestasi kerja pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 8(3), 1–11.
- Ellyzar, N., Mukhlis Yunus, & Amri. (2017). Pengaruh mutasi kerja, beban kerja dan konflik interpersonal terhadap stres kerja serta dampaknya pada kinerja karyawan BPKP Perwakilan Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis Unsyiah*, 1, 37.
- Faiz, A., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2020). Sistem merit pada sektor pemerintahan: Proses pengisian dan penempatan jabatan pelaksana di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah. *Perspektif, Universitas Medan Area*, 9(2), 406–417.
- Garry, A. P. (2023). *Kepentingan dalam mutasi aparatur sipil negara di Kabupaten Bungo pada tahun 2021* [Disertasi, Universitas Andalas].
- Halim, R. (2022). Pengaruh sistem mutasi jabatan terhadap pengembangan karir pegawai di pemerintahan daerah. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 14(1), 23–35.
- Hidayat, F., Saputra, R., & Nurrahman, A. (2022). Pengembangan kompetensi sumber daya aparatur melalui diklat teknis pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 10(1), 52–72.
- Hidayati, N. (2023). Tantangan dalam implementasi sistem mutasi jabatan di organisasi publik. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 12(1), 45–60.
- Hilal, M. (2021). Meningkatkan kualitas aparatur sipil negara guna menghadapi dinamika perkembangan masyarakat. *Lemhannas RI*, 44, 1–15.
- Jisman, J. (2022). Praktek kolusi dan nepotisme dalam birokrasi. *PARADIGMA: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 93–108.
- Kadir, A., Sampara, N., & Bachtiar, Y. (2021). Pengaruh demosi, mutasi dan promosi jabatan terhadap kinerja pegawai pada sekretariat daerah Kabupaten Pinrang. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 105–112.
- Kalesaran, M. (2021). Penerapan sistem merit menuju pemerintahan yang terpercaya (trustworthy government): Studi penelitian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(1), 71–80.

- Krisdayanti, & Edyanto, E. (2019). Analisis proses mutasi promosi jabatan pegawai negeri sipil di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gowa. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 3(1).
- Kusmana, D., & Abubakar, M. B. (2023). Efektivitas peningkatan kinerja aparatur sipil negara melalui sistem merit (merit system) pada sekretariat daerah Kabupaten Bener Meriah tahun 2019. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 2(2), 75–81.
- Kusuma, R., & Setiawan, I. (2023). Effective job mutation policies: A framework for organizational success. *Journal of Management Studies*, 15(4), 201–215.
- Lumentut, J. (2020). Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di Kantor Camat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 1–10.
- Malihah, L., dkk. (2024). Implementasi pengarusutamaan gender dalam rekrutmen dan promosi jabatan struktural. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(2), 1090–1105.
- Martinez, C. (2022). Employee satisfaction and the seniority system: A double-edged sword. *International Journal of Human Resource Management*, 33(4), 789–805.
- Mulej, M., Kajzer, Š., & Rebernik, M. (2020). Systems theory and its application in sustainable development. *Systems Research and Behavioral Science*, 37(1), 10–21.
- Mulyana, A. (2020). Pengantar sistem dalam manajemen. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 12(1), 40–55.
- Nenoliu, A. (2023). Pelaksanaan mutasi pegawai dalam pengembangan karier ASN oleh BKPSDMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. *J Political Science*.
- Ninggimus, Y. D., & Rares, J. (2023). Implementasi kebijakan dalam penempatan ASN pada jabatan struktural di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Puncak. *Jurnal Administrasi Reformasi*, 5(2), 45–60.
- Nugroho, E. S., dkk. (n.d.). Pelaksanaan mutasi jabatan struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang (studi kasus pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6).
- Permata, D., & Mubarak, A. (2023). Penerapan sistem merit dalam mutasi jabatan pegawai negeri sipil di Kantor Camat Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 2(4), 387–393.
- Prasetyo, B. (2020). Pengembangan sumber daya manusia dalam manajemen kepegawaian. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 11(3), 67–80.

- Prayogi, R. K. D. (2024). Implementasi kebijakan sistem merit sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Teknologi dan Komputasi*, 6(2).
- Purnomo, E. P., & Rusli, Z. (2020). Politik mutasi jabatan struktural pegawai negeri sipil pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 163–182.
- Putra, A. (2020). Pengaruh mutasi jabatan terhadap akuntabilitas di sektor publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 123–135.
- Rahman, F. (2022). Kinerja pegawai dan mutasi jabatan: Sebuah analisis. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(3), 78–90.
- Rahman, M. (2024). Pentingnya pemahaman sistem dalam kehidupan sehari-hari. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 18(1), 56–70.
- Ruitan, C. R., Mantiri, M., & Kairupan, J. (2018). Proses mutasi aparatur sipil negara dalam meningkatkan kualitas kerja (studi di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Rustianingsih, I. (2015). Peluang pegawai negeri sipil perempuan dalam promosi jabatan struktural. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 123–134.
- Sait, A. (2023). Problematika dan tantangan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 47–60.
- Samsoleh, E. (2018). Rancang bangun sistem mutasi dan promosi jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah. *Jurnal Transistor Elektro dan Informatika (TRANSISTOR EI)*, 3(3).
- Sani, A., Umar, M. N., & Al-Qardhawy, M. Y. (2024). Sosio-kultural Aceh tentang kepemimpinan perempuan dalam pandangan Abuya Profesor Muhibuddin Waly. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 1044–1051.
- Sari, D. (2021). Transparansi dalam proses mutasi jabatan: Implikasi terhadap kepuasan kerja. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 9(4), 201–215.
- Sari, D. (2022). Pengaruh kesetaraan gender di birokrasi terhadap peluang promosi jabatan. *Jurnal Demokrasi dan Pembangunan Lokal*, 5(1), 89–102.
- Sari, R. (2022). Evaluasi kebijakan mutasi jabatan dalam organisasi: Praktik dan rekomendasi. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 13(2), 78–92.
- Saropah, A. (2023). Hubungan penyederhanaan birokrasi dengan kinerja organisasi di Pemerintah Kota Bontang. Universitas Mulawarman. Kalimantan Timur.
- Smith, J. (2020). Understanding the seniority system in employee promotions. *Human Resource Management Review*, 30(2), 123–135.

- Sofyan, S., Haning, T., & Abdullah, T. (2022). Meritokrasi dalam promosi jabatan dan mutasi aparatur sipil negara. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 17882–17895.
- Subandi, S. (2019). Promosi jabatan, mutasi, dan motivasi berprestasi sebagai upaya meningkatkan prestasi kerja aparatur sipil negara. *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(1), 118–128.
- Suharto, A. (2021). Sistem mutasi jabatan dalam pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 45–60.
- Sururama, R., Winowoda, O. R., & Eka, A. (2023). Pengembangan sumber daya aparatur melalui diklat teknis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 9(2), 213–221.
- Tjikoa, F., Liando, D., & Lengkong, J. (2019). Mutasi aparatur sipil negara di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2018. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 1–10.
- Tory, T. F., & Hanum, R. A. (2024). Nepotisme dan korupsi di pemerintahan dalam perspektif etika. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 3(1), 126–135.
- Ulfah, F. (2013). Pelaksanaan mutasi transfer dan promosi pegawai negeri sipil pada sekretariat daerah di Kabupaten Kapuas. *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 2(2).
- Wati, R. (2021). Kebijakan mutasi jabatan dan pengaruhnya terhadap kepercayaan pegawai. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1), 34–50.
- Yuliawati, R., & Widiastuti, T. (2021). Analisis perempuan dalam jabatan struktural pemerintah daerah: Studi kasus Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 187–200.
- Yulistira, Z. (2024). Analisis implementasi merit system dalam kompetensi pengisian jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan di Pemerintah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 9(4).

Berita Online

Baranews Aceh. (2024, 20 Juli). Ulama Aceh Abu Mudi sebut haram hukumnya mendukung pemimpin perempuan. *Baranews Aceh*.
<https://baranewsaceh.co/ulama-aceh-abu-mudi-sebut-haram-hukumnya-mendukung-pemimpin-perempuan/>